

# Peran Inklusi Keuangan terhadap Pencapaian Target Presentase Penduduk Miskin dalam RPJMN 2024: Studi Kasus di Indonesia

Rizki Harismawan Januarsyah\*

\* Penulis korespondensi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Rida Ah Hasanah

Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Tiara Wanda Meilani

Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

---

## JEL Classification Code:

I6, G

## Kata kunci:

Poverty, Welfare, Financial Inclusion

## Email penulis:

6022001023@student.unpar.ac.id \*

6022001014@student.unpar.ac.id

6022001003@student.unpar.ac.id

## Abstract

*The purpose of this study is to determine how financial inclusion contributes to the attainment of the poverty reduction objectives outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2019–2024. Panel data from 34 Indonesian provinces between 2010 and 2022 was used. The Panel Least Square (PLS) method was used to process the data. The findings demonstrate that financial inclusion considerably lowers the poverty rate. Forecasting revealed that the 2024 poverty rate was 9.07%, indicating that the 2024 RPJMN target was not met.*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inklusi keuangan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2019-2024. Data panel dari 34 provinsi di Indonesia antara tahun 2010 dan 2022 digunakan. Metode *Panel Least Square* (PLS) digunakan untuk mengolah data. Temuan menunjukkan bahwa inklusi keuangan secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil prakiraan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2024 adalah 9,07%, yang mengindikasikan bahwa target RPJMN 2024 tidak tercapai.



## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh setiap negara di dunia. Badan Pusat Statistik (BP) menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia diartikan sebagai ketidaksanggupan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Sementara itu, pada tahun 2022, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank, diperkirakan sekitar 9,5% penduduk di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan nasional, sedangkan proporsi penduduk yang memiliki pendapatan di bawah \$1,90 per hari berjumlah 2.3 %. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan memiliki delapan tujuan yang salah satunya adalah mengurangi kesenjangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Omar & Inaba (2020) menyebutkan bahwa inklusi keuangan adalah akses, penggunaan dan penyediaan layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk masyarakat rentan. Inklusi keuangan dapat diartikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasar dari definisi yang dikeluarkan oleh OJK dalam surat edaran nomor 31/SEOJK.07/2017 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk turut membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga memiliki kaitan dengan *sustainable development* dimana penelitian ini berkontribusi untuk membantu mencapai target utama dalam *sustainable development goals* yaitu terbebas dari kemiskinan.

Banyak bukti di berbagai negara menunjukkan bahwa akses ke layanan keuangan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan (Iqbal et al., 2020). Inklusi keuangan telah dianggap sebagai alat dinamis untuk mencapai stabilitas makroekonomi multidimensi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesetaraan pendapatan untuk negara maju dan berkembang (Omar & Inaba, 2020). Menurut *World Bank* (2022) inklusi keuangan dianggap sebagai faktor utama yang mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Park & Mercado (2016) melakukan penelitian mengenai inklusi keuangan dan kemiskinan di 177 negara dan 37 diantaranya merupakan negara berkembang di Asia, para peneliti menemukan bahwa inklusi keuangan dapat menurunkan kemiskinan. Inklusi keuangan melalui peran bank memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kemiskinan, terlepas dari indikator apa yang digunakan. Dengan demikian, luasnya inklusi akses keuangan bermanfaat dalam pengurangan kemiskinan di India. Inoue (2019), kemudian Lal (2018) menyatakan bahwa inklusi keuangan melalui bank-bank komersial tidak memiliki pengaruh pada pengentasan kemiskinan.

Mengutip dari *website* Bappenas disebutkan bahwa menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2030 menjadi target dalam *sustainable development*, dengan proyeksi baseline (*business as usual*) tingkat kemiskinan masih di angka 6,61% pada tahun 2030, sementara dengan skenario intervensi angkanya dapat mencapai 3,38%. Untuk mencapainya penurunan tingkat kemiskinan ini maka perlunya akselerasi program untuk pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Kemudian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 (RPJPMN) terdapat target besaran persentase kemiskinan sebesar 6% - 7% pada tahun 2024. Namun berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada nyatanya saat ini persentase penduduk miskin masih berada pada kisaran 9,36% pada juni 2023. Persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,36% tentu masih sangat jauh dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 (RPJPMN) maupun dalam *sustainable development*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran inklusi keuangan dalam membantu pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini berkontribusi membantu melihat pencapaian persentase penduduk miskin pada tahun yang sudah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 (RPJMN).

## Landasan Teori dan Tinjauan Literatur

Definisi inklusi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada World Bank (2022) didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal seperti kurangnya pengetahuan dan kepedulian serta akses yang tidak tersedia bagi masyarakat yang berada di daerah. Melalui inklusi keuangan, akses terhadap layanan keuangan formal diperluas sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses produk keuangan. Menurut Inoue (2019) luasnya jangkauan inklusi keuangan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di India. Selain itu Omar & Inaba (2020), menyebutkan bahwa inklusi keuangan telah dianggap sebagai alat dinamis untuk mencapai stabilitas makroekonomi multidimensi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesetaraan pendapatan untuk negara maju dan berkembang.

Jabir et al. (2017) menganalisis pengaruh inklusi keuangan pada pengurangan kemiskinan di rumah tangga yang memiliki penghasilan rendah di 35 negara di sub-Sahara Afrika. Dengan merujuk pada data *cross-sectional* pada tahun 2011, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Afrika sub-Sahara. Hal ini terjadi melalui peningkatan penyediaan kekayaan bersih dan manfaat kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat miskin. Menurut Demirgüç-Kunt, et al. (2018) manfaat inklusi keuangan lebih lanjut adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan penyimpanan dan pemindahan dana dengan cepat dan mudah. Kemampuan ini membuka berbagai peluang, termasuk mempermudah kegiatan transaksi, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat, hingga membantu mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian Park dan Mercado (2018) mengevaluasi efek inklusi keuangan lintas negara terhadap tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan di berbagai kelompok pendapatan negara. Penulis memperkenalkan indeks inklusi keuangan secara signifikan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, walaupun hubungan ini hanya berlaku bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan menengah-tinggi, bukan untuk negara-negara dengan pendapatan menengah-bawah dan rendah. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak menemukan dampak signifikan inklusi keuangan pada disparitas pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Honohan (2008) memfokuskan pada sebagian kecil populasi orang dewasa yang menggunakan perantara keuangan formal di 162 negara, serta mengkaji hubungannya dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Temuan utama dari penelitian yang dilakukan di sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa akses keuangan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut juga menemukan bukti bahwa akses keuangan secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini membuat indeks inklusi keuangan menggunakan teknik *Principal Component Analysis* (PCA). *Principal Component Analysis* (PCA) merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi pada suatu data. Metode ini diterapkan dengan mengamati suatu variabel yang mungkin memiliki korelasi, kemudian mengubahnya menjadi nilai yang tidak memiliki korelasi yang dikenal sebagai komponen utama. Penelitian ini juga melakukan teknik *forecasting* data untuk menentukan apakah target persentase penduduk miskin yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (RPJMN) akan tercapai atau tidak.

Pembuatan indeks inklusi keuangan dibangun dari tiga variabel yang mewakili setiap pilar dari inklusi keuangan. Pertama *usability* menggambarkan penggunaan atas layanan dan produk keuangan yang diprosikan dengan jumlah kredit sehingga dapat menunjukkan seberapa banyak orang yang menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan. Kedua *availability* menggambarkan kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan maupun biaya yang diprosikan dengan jumlah cabang bank sehingga dapat menunjukkan seberapa besar keterjangkauan masyarakat untuk menggunakan layanan dan produk perbankan. Ketiga *accessibility* menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat diprosikan dengan dana pihak ketiga, dimana bank sebagai lembaga intermediasi

membutuhkan dana untuk disalurkan pada Masyarakat. Dengan menggunakan DPK dapat menunjukkan seberapa besar masyarakat menyimpan uangnya di lembaga keuangan Erlando (2020).

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

Variabel	Periode	Definisi Variabel	Sumber
Persentase penduduk Kemiskinan	2010-2022	Persentase masyarakat miskin di setiap provinsi	Badan Pusat Statistik
Jumlah Cabang Bank		Jumlah cabang bank di setiap provinsi	Otoritas Jasa Keuangan
Jumlah Kredit		Jumlah kredit bank di setiap provinsi	Otoritas Jasa Keuangan
DPK Bank		Jumlah DPK didapatkan dari jumlah tabungan, giro dan deposito	Otoritas Jasa keuangan
PDRB		Nilai keseluruhan semua barang dan jasa	Badan Pusat Statistik

Sumber: Penulis

Model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 Indeks Inklusi_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

**Tabel 2.** Penjelasan Variabel Model

Variabel	Definisi
<i>Kemiskinan<sub>it</sub></i>	Merupakan persentase penduduk miskin di setiap provinsi.
<i>Indeks Inklusi<sub>it</sub></i>	Merupakan sebuah indeks yang dibangundengan 3 aspek inklusi keuangan (jumlah cabang bank, jumlah kredit dan DPK)
<i>PDRB<sub>it</sub></i>	Nilai dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tertentu.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa tingkat persentase kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia bagian timur. Pada tahun 2022 Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat memiliki persentase kemiskinan sebesar 6,17% dan 7,64% sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase kemiskinan sebesar 5,29%. Terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, terkait dengan akses yang sulit dan adanya keterbatasan mobilisasi. Data ini sejalan dengan penelitian Purwono et al. (2011) yang menyatakan bahwa 60%-65% masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat hidup di bawah garis kemiskinan.

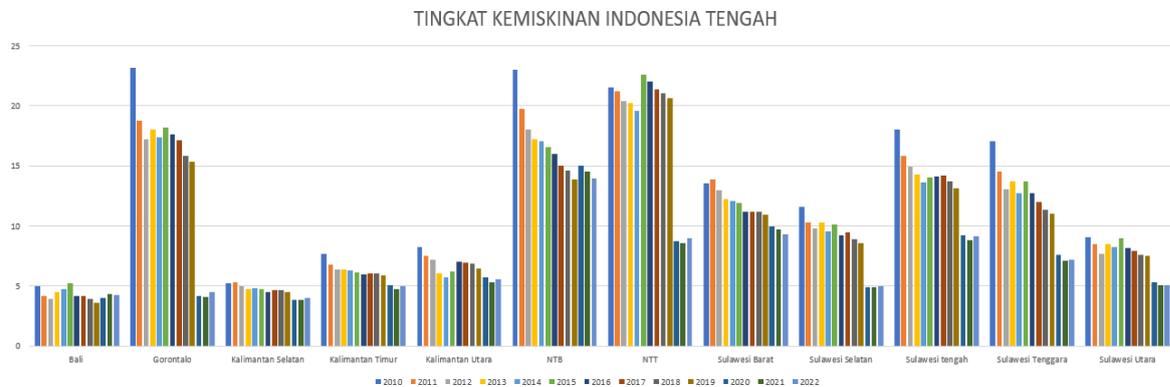
**Gambar 1.** Diagram Kemiskinan Indonesia Timur



Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Barat tetap tinggi selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia bagian tengah. NTT mencatatkan angka kemiskinan sebesar 9%, NTB memiliki persentase kemiskinan tertinggi di antara ketiga provinsi ini dengan 13,98%, dan Sulawesi Barat mencapai 9,33%. Sebagai pembandingan, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yaitu 4,03%. Tingginya angka kemiskinan di NTT, NTB, dan Sulawesi Barat menunjukkan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi dalam menekan angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Matondang (2017) yang menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di NTT cenderung berlanjut meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan intervensi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor struktural dan kultural yang mendasari kemiskinan di wilayah ini memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar pengentasan kemiskinan dapat mencapai hasil yang signifikan.

**Gambar 2.** Diagram Kemiskinan Indonesia Tengah

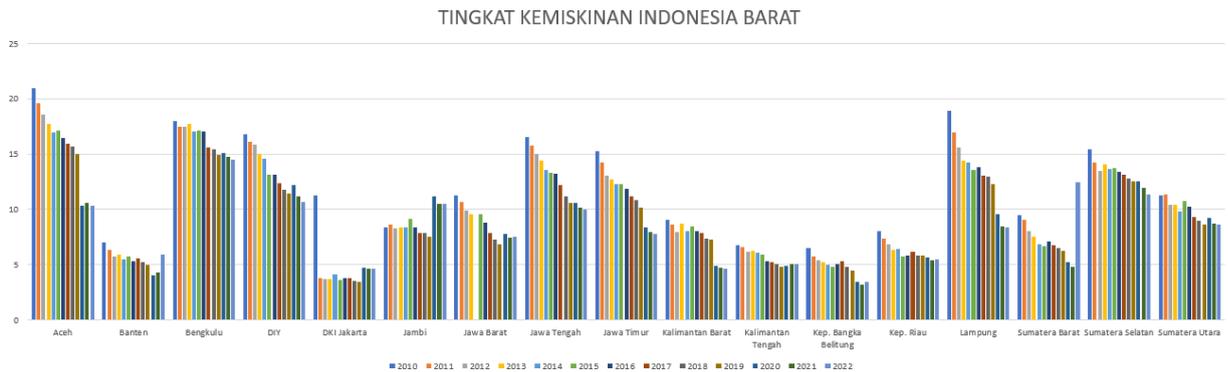


Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Sumatera Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia bagian barat. Bengkulu mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 14,53%, disusul oleh Sumatera Selatan sebesar 11,37%, DIY sebesar 10,64%, dan Jawa Tengah sebesar 10,02%. Sebagai perbandingan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yaitu 3,48%. Tingginya angka kemiskinan di empat provinsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi turut berperan dalam meningkatnya angka kemiskinan di wilayah-wilayah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Qurrota A'yun (2021) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa DIY memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik di wilayah tersebut yang mempersulit upaya penurunan kemiskinan, meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan program yang diterapkan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah ini perlu memperhatikan kondisi dan tantangan lokal agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif

dalam jangka panjang.

**Gambar 3.** Diagram Kemiskinan Indonesia Barat



Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat nilai korelasi antar variabel untuk seluruh variabel yang digunakan dalam pembuatan indeks inklusi keuangan. Korelasi antara jumlah cabang bank dan jumlah kredit tergolong sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0.524. Sementara itu, korelasi antara jumlah cabang bank dan dana pihak ketiga tergolong lemah dengan nilai korelasi sebesar 0.336. Di sisi lain, jumlah kredit memiliki korelasi yang sangat kuat dengan dana pihak ketiga, terlihat dari nilai korelasi yang mencapai 0.711.

**Tabel 3.** Korelasi Antar Variabel Dalam Pembuatan Indeks Inklusi Keuangan

	Jumlah Cabang Bank	Dana Pihak ketiga	Jumlah Kredit
Jumlah Cabang Bank	1.000	0.336	0.524
Dana Pihak ketiga	0.336	1.000	0.711
Jumlah Kredit	0.524	0.711	1.000

Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat seberapa besar bobot setiap variabel yang digunakan untuk membangun indeks inklusi keuangan. Ketiga variabel memiliki bobot yang cukup besar, jumlah cabang bank sebesar 51,5%, dana pihak ketiga sebesar 70,6%, jumlah kredit sebesar 84%. Dari ketiga variabel yang digunakan, jumlah kredit memiliki proporsi yang lebih besar sehingga dapat diperkirakan bahwa jumlah kredit memberikan pengaruh yang lebih besar dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

**Tabel 4.** Proporsi Keterkaitan Jumlah Cabang Bank, Pihak Ketiga, dan Kredit

	Initial	Extraction
Jumlah Cabang Bank	1.000	0.515
Dana Pihak ketiga	1.000	0.706
Jumlah Kredit	1.000	0.840

Sumber: Penulis

Berdasarkan diagram yang disajikan, terlihat dengan jelas bahwa indeks inklusi keuangan untuk setiap provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terutama, Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat mencatatkan nilai indeks inklusi keuangan yang

cenderung negatif, yang berarti ketiga provinsi ini berada di bawah rata-rata indeks inklusi keuangan yang dihasilkan melalui analisis PCA (Principal Component Analysis). Rendahnya indeks inklusi keuangan di ketiga provinsi tersebut dapat dipahami sebagai dampak dari ketidakmerataan penyebaran layanan keuangan. Penyebaran jumlah cabang bank yang terbatas, akses kredit yang sangat minim, serta rendahnya perolehan dana pihak ketiga menjadi faktor-faktor utama yang menghambat perkembangan inklusi keuangan di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Temuan ini menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan di provinsi-provinsi ini. Diperlukan strategi yang lebih terencana dan efektif agar masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia Bagian Timur.

**Gambar 4.** Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa indeks inklusi keuangan di masing-masing provinsi di wilayah Indonesia Bagian Tengah bervariasi dengan cukup signifikan. Beberapa provinsi menunjukkan indeks positif, sementara yang lain menunjukkan nilai negatif. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian utama karena memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam penyebaran layanan keuangan di daerah ini. Terbatasnya jumlah cabang bank, akses kredit yang minim, serta rendahnya perolehan dana pihak ketiga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks ini. Temuan ini menyoroti perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan, agar masyarakat setempat dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di provinsi tersebut.

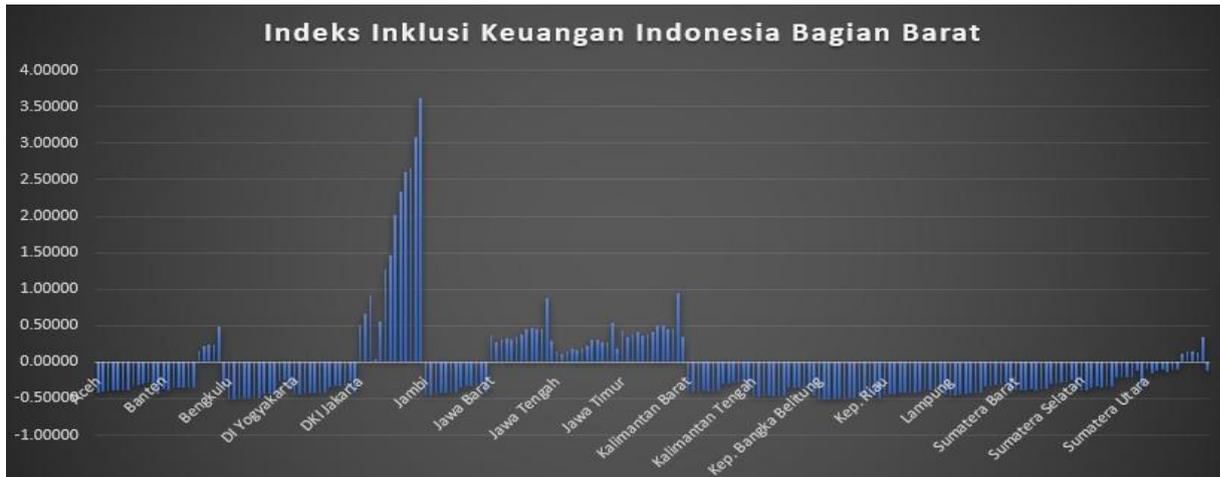
**Gambar 5.** Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: Penulis

Berdasarkan diagram yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai indeks inklusi keuangan di setiap provinsi di wilayah Indonesia Bagian Barat menunjukkan perbedaan yang mencolok. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang tergolong baik. Hal ini disebabkan oleh penyebaran layanan keuangan yang cukup merata, ditunjukkan dengan jumlah cabang bank, akses kredit, dan perolehan dana pihak ketiga yang sudah baik. Namun, meskipun keempat provinsi tersebut menunjukkan angka yang positif, masih terdapat beberapa provinsi lainnya yang memiliki nilai indeks inklusi yang kurang memuaskan. Situasi ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan akses layanan keuangan di daerah- daerah yang masih tertinggal.

**Gambar 6.** Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: Penulis

**Tabel 5.** Hasil Estimasi

Variabel Dependen Kemiskinan		
Variabel Independen	Coefficient	Probabilitas
C	11.72176	0.0000
Indeks Inklusi Keuangan	-1.0925	0.0305
PDRB	-3.5076	0.0000

Sumber: Penulis

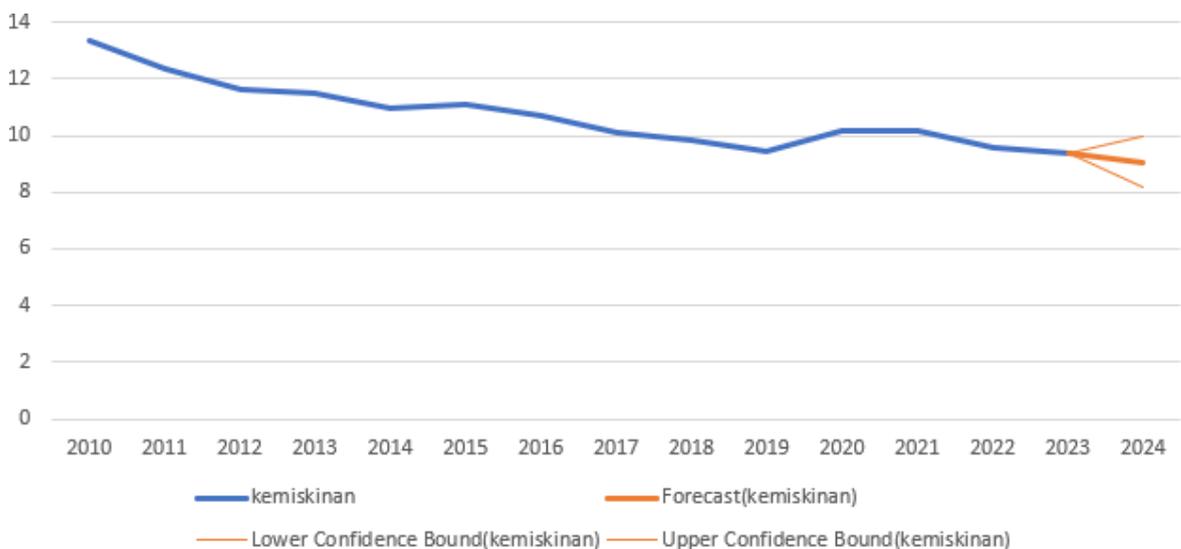
Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Nilai *coefficient* yang didapatkan memiliki tanda negatif yang artinya indeks inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin dimana ketika indeks inklusi keuangan di setiap provinsi mengalami kenaikan maka persentase penduduk miskin di setiap provinsi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Dengan menggunakan PDRB sebagai variabel kontrol, penelitian ini menemukan bukti kuat adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB, maka akan semakin rendah pula proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya peningkatan pada PDRB dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Indeks inklusi keuangan terbangun dari tiga variabel yaitu jumlah cabang bank, jumlah dana pihak ketiga dan jumlah kredit. Meningkatnya indeks inklusi keuangan berpotensi memberikan dukungan untuk meningkatkan akses terhadap perbankan. Masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga keuangan bank dan produk perbankan akan sangat terbantu dengan adanya akses yang

mudah terhadap layanan dan produk perbankan. Berikutnya bank sebagai lembaga intermediasi memerlukan dana untuk disalurkan menjadi kredit, indeks inklusi keuangan yang meningkat dapat mencerminkan bahwa masyarakat dapat membantu bank dalam menghimpun dana melalui penyimpanan dana di bank. Peningkatan dana pihak ketiga diasumsikan akan meningkatkan kredit yang diberikan pada masyarakat akan semakin tinggi. Dengan pemberian kredit kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan dorongan bagi masyarakat miskin. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnis maupun usaha karena modal yang dimiliki dapat bertambah dengan pemberian kredit. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki tingkat bunga sangat rendah.

Secara keseluruhan nilai indeks inklusi keuangan memiliki pola yang bervariasi. Pada tahun 2022 Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta mengalami peningkatan pada indeks inklusi keuangan dan penurunan persentase kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan hasil estimasi yang menunjukkan adanya pengaruh yang terbalik, ketika indeks inklusi meningkat maka persentase kemiskinan akan menurun. Indeks inklusi keuangan cenderung memiliki nilai yang rendah di Wilayah Indonesia Bagian Timur, hal itu terjadi karena terdapat hambatan dalam pelaksanaan inklusi keuangan yaitu sulitnya mencapai wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat memberikan akses pada lembaga keuangan di wilayah pedalaman. Hal ini artinya bahwa penelitian yang telah dilakukan sudah sejalan dengan Park & Marco (2016) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki peran dalam membantu untuk menurunkan kemiskinan di 177 negara

Gambar 7. Hasil *Forecasting*



Sumber: Penulis

Kami melakukan teknik *forecasting* data untuk memperkirakan apakah dengan adanya dorongan dari inklusi keuangan akan membantu pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024. Kami telah mendapatkan hasil bahwa tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di atas target yang telah ditentukan dimana persentase kemiskinan diperkirakan sebesar 9,07% di tahun 2024 yang artinya target persentase tingkat kemiskinan sebesar 6%-7% tidak tercapai. Meskipun target presentase kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak tercapai, persentase tingkat kemiskinan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan. Pada tahun 2023 tingkat persentase kemiskinan sebesar 9.36% kemudian pada tahun 2024 diperkirakan menjadi 9.07% artinya terdapat penurunan sebesar 0,29%.

## Kesimpulan dan Implikasi

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam mengatasi kemiskinan, dengan angka sebesar 9,5% pada tahun 2022 yang mana penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inklusi keuangan dalam membantu mencapai tujuan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah dengan data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia pada periode 2010-2022. Hal tersebut mendapatkan hasil bahwa inklusi keuangan memengaruhi persentase penduduk miskin yang mana nilai coefficient yang didapatkan memiliki tanda negatif bahwa indeks inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin. Ketika indeks inklusi keuangan di setiap provinsi mengalami kenaikan maka persentase penduduk miskin di setiap provinsi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya ketika indeks inklusi keuangan mengalami penurunan maka persentase penduduk makin akan meningkat. Melalui penerapan teknik PCA, indeks inklusi keuangan berhasil dibangun berdasarkan tiga pilar utama yaitu *usability*, *accessibility*, dan *availability*. Berdasarkan indeks yang dibuat, setiap wilayah baik Indonesia timur, barat dan tengah memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang bervariasi. Park & marco (2016) menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki peran dalam membantu menurunkan kemiskinan di 177 negara, artinya bahwa penelitian ini sudah sejalan dengan penelitiannya.

Melalui Teknik forecasting dinyatakan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak tercapai, namun persentase tingkat kemiskinan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan. Pada tahun 2023 persentase kemiskinan sebesar 9.36% kemudian pada tahun 2024 diperkirakan mejadi 9.07% artinya terdapat penurunan sebesar 0,29%. Tidak tercapainya target persentase penduduk miskin yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024 (RPJMN) bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Inklusi keuangan merupakan kebijakan pelengkap yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi persentase tingkat kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini mencakup pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi menjadi tantangan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melibatkan berbagai kebijakan, termasuk fokus pada inklusi keuangan. Inklusi keuangan dianggap sebagai alat dinamis yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan indeks inklusi keuangan secara signifikan menurunkan persentase tingkat kemiskinan sehingga kami menyarankan pemerintah memperluas jangkauan inklusi keuangan. Dengan memperluas jangkauan dan pemerataan inklusi keuangan di setiap provinsi diharapkan target persentase tingkat kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 (RPJMN) bisa tercapai. Namun hasil penelitian bisa saja berubah ketika terdapat perubahan pada variabel yang digunakan atau variabel lain yang tidak turut dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk penelitian selanjutnya menganalisis heterogenitas pengaruh inklusi keuangan dengan menggunakan variabel yang berbeda yang mungkin saja mendapatkan hasil berbeda sesuai dengan variabel apa saja yang digunakan.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik*. (2007). Badan Pusat Statistik. Retrieved November 4, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/2/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Bank Indonesia. (2011). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2010. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2010.aspx>
- Bank Indonesia. (2012). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2011. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2011.aspx>
- Bank Indonesia. (2013). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2012. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2012.aspx>

- [perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2012.aspx](http://perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2012.aspx)
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2004). Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence. *National Bureau of Economics Research*. <https://doi.org/10.3386/w10979>
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234–266. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2008). Banking Services for Everyone? Barriers to Bank Access and Use around the World. *The World Bank Economic Review*, 22(3), 397–430. <https://doi.org/10.1093/wber/lhn020>
- Bhandari, A. K. (2009). Access to Banking Services and Poverty Reduction: A State-Wise Assessment in India. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1395079>
- Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). Benchmarking Financial Systems around the World. World Bank Policy Research Working Paper, 6175.
- Craigwell, R., Bynoe, D., & Lowe, S. (2012). The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean. *International Journal of Development Issues*, 11(1), 4–18. <https://doi.org/10.1108/14468951211213831>
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). DAMPAK INKLUSI KEUANGAN TERHADAP. *Www.bmeb-Bi.org*, 18(4). <https://www.bmeb.bi.org/index.php/BEMP/article/download/574/895>
- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). FINANCIAL INCLUSION FOR INCLUSIVE GROWTH OF INDIA - A STUDY OF INDIAN STATE. *International Journal of Business Management & Research*, 3(1), 147–156.
- Faharuddin, F., & Endrawati, D. (2022). Determinants of working poverty in Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 24(3). <https://doi.org/10.1108/jed-09-2021-0151>
- Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking & Finance*, 32(11), 2493–2500. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.004>
- Inoue, T. (2018). Financial inclusion and poverty reduction in India. *Journal of Financial Economic Policy*, 11(1), 21–33. <https://doi.org/10.1108/jfep-01-2018-0012>
- Iqbal, K., Roy, P. K., & Alam, S. (2020). The impact of banking services on poverty: Evidence from sub-district level for Bangladesh. *Journal of Asian Economics*, 66, 101154. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2019.101154>
- Kusuma, A. A. N. J., & Indrajaya, I. G. B. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 993–1022.
- Lal, T. (2018). Impact of financial inclusion on poverty alleviation through cooperative banks. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 808–828. <https://doi.org/10.1108/ijse-05-2017-0194>
- Larasati, E. (2023). Badan Kebijakan Fiskal - Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditaban, Rasio Gini Menurun. [fiskal.kemenkeu.go.id. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459)
- Li, Z., & Qamruzzaman, M. (2023). Nexus between Environmental Degradation, Clean Energy, Financial Inclusion, and Poverty: Evidence with DSUR, CUP-FM, and CUP-BC Estimation. *Sustainability*, 15(19), 14161. <https://doi.org/10.3390/su151914161>
- Matondang, E. (2017). Finding Out the Potency of Nusa Tenggara Timur in Poverty Alleviation: The Effect of Local Government's Policy. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 231–242. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.231-242>
- Mohammed, J. b., Mensah, L., & Gyeke-Dako, A. (2017). Financial Inclusion and Poverty Reduction in Sub-Saharan Africa. *The African Finance Journal*, 19, 1-22.
- Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, 24, 230–237. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.09.007>
- Oktaviani, Y., & Qurrota A'yun, I. (2021). Analysis of the Effect of Unemployment Rate, RMW, and HDI on Poverty Rates in the Special Region of Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 5(2), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jerss.v5i2.11339>
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 9–37.

- <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2013. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2013.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2014. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-desember-2014.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2015. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2015.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2016. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2016.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2017. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2017.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). STATISTIK PERBANKAN INDONESIA INDONESIAN BANKING STATISTICS 2017. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2017/SPI%20Desember%202017.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2018. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2018.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2019. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2020. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2021. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2022. OJK. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2022.aspx>
- Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2016). Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Asia? *Financial Inclusion in Asia*, 61–92. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-58337-6\\_3](https://doi.org/10.1057/978-1-137-58337-6_3)
- Park, C. Y., & Mercado, Jr., R. V. (2018). Financial Inclusion: New Measurement and Cross-Country Impact Assessment. Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.22617/WPS189270-2>
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in

- Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- World Bank. (2014). *Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Retrieved September 28, 2023, from World Bank. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>
- World Bank. (2022). *Financial Inclusion*. Retrieved September 28, 2023, from World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>